

**COLABORATIVE GOVERNANCE DINAS PERTANIAN MANGGARAI TIMUR,
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR PERTANIAN*****COLABORATIVE GOVERNANCE OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF EAST
MANGGRAI, IN AN EFFORT TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF THE
AGRICULTURAL SECTOR*****Almuhajir Haris¹**Universitas
Pancasakti Makassar,
Indonesia¹
email:
almuhajirharis@gmail.com
[m](#)IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol.3, No.1, pp. 41-47
Nopember 2022Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: *Collaborative governance* adalah sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan dalam mencapai tujuan secara bersama. Kerjasama yang dilakukan pada peningkatan sektor pertanian memberikan arah tujuan yang lebih baik kepada masyarakat guna dapat memberikan pengaruh pada peningkatan sektor peningkatan ekonomi pada bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pertanian, *stakeholder* dan masyarakat dalam peningkatan mutu kualitas kinerja sektor pertanian di Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa bentuk kolaborasi Dinas Pertanian Manggarai Timur antara pihak stakeholder dan masyarakat sudah terealisasi dengan baik, tetapi pada penelitian ini terdapat kendala dilapangan yang menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah yakni, para petani mengeluhkan dengan langkahnya pasokan pupuk subsidi pemerintah, selain itu keberpihakan satu sisi atas sumbangan alat pertanian kepada masyarakat diperuntukan pada pihak tertentu, hal ini menimbulkan degradasi semua hasil pertanian masyarakat.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Kinerja, Pertanian.

Abstract: *Collaborative governance* is a process in which various relevant stakeholders are involved in carrying out interests in achieving common goals. Cooperation carried out in improving the agricultural sector provides a better direction for the community in order to be able to influence the increase in the economic improvement sector in the field of economy and people's welfare. This study aims to see how the collaboration is carried out between the Agriculture Service, stakeholders and the community in improving the quality of the performance of the agricultural sector in East Manggarai. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study illustrate that the form of collaboration between the East Manggarai Agricultural Service, between stakeholders and the community has been well realized, but in this study there are obstacles in the field that are of particular concern to the government, namely, farmers complaining about the pace of government subsidized fertilizer supplies, besides that partiality on the one hand, the contribution of agricultural tools to the community is intended for certain parties, this causes the degradation of all community agricultural products.

Keyword: Collaborative Governance, Performance, Agricultural.

PENDAHULUAN

Peningkatan pada sektor pertanian merupakan salah satu tujuan yang diharapkan pemerintah, stakeholder dan masyarakat dalam menjaga kestabilan pangan. Menjaga kestabilan pangan menjadi salah satu catatan penting bagi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi,

alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya ketahanan pangan nasional.

Pembangunan dibidang pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi dan Produktivitas pertanian sekaligus mempertinggi pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Usaha pokok pembangunan pertanian secara terus menerus ditingkatkan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi. Kabupaten Manggarai Timur merupakan wilayah penyangga pusat pertumbuhan

perekonomian secara nasional. Arah kebijakan pembangunan pemerintah harus diletakan pada landasan berbasis potensi dan kearifan lokal suatu daerah. Hal ini terjadi pada pembangunan sektor pertanian dimana setiap daerah mempunyai peluang dan potensi yang menjanjikan, guna peningkatan hasil produksi yang didukung oleh kualitas produksi yang baik dan berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur memiliki banyak potensi dan peluang terhadap sektor pertanian dan perkebunan sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur lebih fokus dan intensif dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok dan masyarakat petani. Bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur mengelola suatu lahan pertanian itu sudah menjadi gaya hidup karena bentangan wilayah yang subur dengan curah hujan hujan yang cukup, dapat memberikan suatu jaminan yang mutlak bahwa dengan fokus mengelola lahan pertanian dapat menunjang perekonomian keluarga karena hasil tanaman padi, kopi, cengkeh, coklat, kemiri dan tanaman palawija lainnya sudah ada dan terpola dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Collaborative governance dipercaya sebagai suatu jawaban dalam menyelesaikan konflik sosial dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, melakukan perumusan pembangunan daerah untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui self-organisasi antar pemangku kepentingan yang memiliki kreativitas, deliberatif dan saling menguntungkan satu sama lain (Thomson & Perry, 2006).

Collaborative Governance menurut La ode, (2018) merupakan suatu model keseimbangan kekuatan dan sumber daya di pemerintah, para pemangku kepentingan, serta lembaga publik lainnya dengan melakukan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang dianggap lebih lemah sehingga mereka saling bergantung

satu sama lain dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama dan implementasi berorientasi pada kesepakatan bersama. *Collaborative governance* adalah penggabungan dari beberapa aktor yang memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan, pada tahap proses penyusunannya semua aktor diberikan kedudukan yang sama, kemudian pengambilan keputusan dibuat secara musyawarah dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh semua aktor pemangku kepentingan, hasil dari kesepakatan para aktor pemangku kepentingan tersebut kemudian diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat, misalnya seperti *collaborative governance* dalam pembentukan Raperda Lahan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana kerjasama Dinas Pertanian kelompok *stakeholder* dan masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Manggarai Timur dengan penerapan *Collaborative Governance* ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi pada sektor pertanian di Kabupaten Manggarai Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan tahapan-tahapan penelitian di lapangan, yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pengumpulan data penelitian, tahap pengolahan data dan analisis data penelitian, tahap penyusunan hasil penelitian, dan tahap pelaporan hasil penelitian. Tahap Persiapan Penelitian yaitu penyusunan instrumen penelitian yang dijadikan dasar untuk melakukan wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Instrumen penelitian disusun berdasarkan rancangan permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono, (2017)

diantaranya, studi pustaka mengadakan pengumpulan data-data yang terdapat dari berbagai studi literatur kepustakaan atau buku-buku dan studi lapangan seperti observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Telaah dokumen dilakukan dengan melakukan kajian mendalam dokumen-dokumen laporan, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Tahap pengolahan data dan analisis data penelitian yaitu data hasil penelitian diolah dengan cara penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Pembangunan dibidang pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sekaligus mempertinggi pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Usaha pokok pembangunan pertanian secara terus menerus ditingkatkan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. Kabupaten Manggarai Timur merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan usaha disektor pertanian, perkebunan dan juga peternakan. Dengan memiliki lahan yang luas dan tanah yang subur serta didukung oleh kondisi iklim/cuaca yang baik, Kabupaten Manggarai Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian yang besar khususnya komoditas tanaman pangan.

Hingga saat ini, tingkat produksi dan produktivitas disektor pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Manggarai Timur cukup tinggi. Hal ini memicu pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya peningkatan produksi para petani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang berbasis teknologi. Hasil komoditi perkebunan merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Manggarai Timur, karena selain merupakan salah satu penyumbang bagi pendapatan daerah, hasil perkebunan juga memberikan

kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya pendapatan para petani.

Hasil perkebunan yang menjadi komoditas unggulan daerah di Kabupaten Manggarai Timur beraneka ragam, antara lain Kopi, Kemiri, Kakao dan masih banyak lainnya. Produksi dan produktivitas komoditi perkebunan di Kabupaten Manggarai Timur cukup tinggi, hal ini dapat terlihat dari data-data hasil komoditi perkebunan pada salah satu sebagai berikut:

Tabel. 1.
Data Hasil Komoditi Perkebunan Pada Salah Satu Kecamatan Di Manggarai Timur

No	Jenis komoditi	Luas areal (ha)				Produksi (ton)	produktivitas	Jmlh (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jmlh			
1	Kelapa	15.50	48.90	-	64.40	59.62	1219.14	439
2	Jambu mente	4.25	244.31	40.58	289.14	49.63	203.14	624
3	Kopi	264.66	1,746.89	13.32	2,024.87	474.46	291.11	4,101
	a.arabika	118.68	616.25	7.47	742.40	148.40	241	1,521
	b.robusta	145.98	1,130.64	5.85	1,282.47	326.06	288	2,580
4	Kakao	284.41	326.31	1.00	611.72	140.38	430	1,292
5	Kemiri	43.82	237.47	-	281.29	154.4	650.36	599
6	Kapuk	-	-	-	-	25.86	0	-
7	Cengkeh	397.92	113.65	8.00	519.57	30.40	228	928
8	Pinang	30.23	38.20	-	68.43	0.68	796	341
9	Vanili	27.50	8.00	-	35.50	1.46	85	133
10	Lada/merica	12.55	2.75	-	15.30	-	531	100
11	Asam	-	-	-	-	-	0	-
12	Jarak pagar	-	-	-	-	3.40	0	-
13	Tembakau	-	9.00	-	9.00	-	680	55
14	Aren/lontar	-	-	-	-	-	0	-
15	Cassivera	-	-	-	-	-	0	-
16	Pala	6.75	-	-	6.75	-	0	37
Total		1,041.54	2,760.73	62.90	3,868.42	-	608.73	8,379

Sumber Data Dinas Pertanian Kab. Manggarai Timur, 2021

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus menggalakan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui tiga hal yaitu peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan pemanfaatan pangan. Program ini bertujuan untuk menanggulangi terjadinya masalah rawan pangan masyarakat. Untuk meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat Manggarai Timur, dilakukan dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas pangan seperti padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan jenis palawija lainnya baik melalui usaha pertanian lahan basah maupun lahan kering. Diharapkan dengan peningkatan hasil produksi pangan, dapat terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu, rumah tangga dan masyarakat pada umumnya yang cukup jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau di seluruh

wilayah Manggarai Timur. Berikut jumlah luas Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 sampai dengan Keadaan April 2022.

Tabel 2.

Produktivitas Lahan Padi Sawah

No	Kec	Tahn 2020			Keadaan April 2021			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Borong	2.573	3.319	11.984	3,60	886,60	641,0	2,487,08
2	Rana mese	2.202	2.446	11.007	4,50	803,40	253,0	961,40
3	Kota komba	4.263	3.909	16.027	4,10	1.557,00	541,0	2,245,15
4	Elar	1.154	1.750	6.826	3,90	1.218,00	76,0	247,76
5	Elar selatan	1.339	2.273	9.547	4,20	2.166,20	71,0	274,77
6	Samba rampas	1.773	1.781	6.946	3,90	1.233,90	111,0	507,27
7	Poco ranaka	2.213	2.378	8.323	3,50	1.156,00	225,0	751,50
8	Pocoranaka timur	3.819	3.104	11.795	3,80	961,50	38,0	142,12
9	Lamba leda	1.792	1.997	7.389	3,70	978,80	171,0	598,50
Jumlah		21.127	22.957	89.807	3,91	10.961,00	2.127	8.216
								3,86

Sumber Data Dinas Pertanian Kab. Manggarai Timur, 2021

Hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas memberikan gambaran tentang kolaborasi Dinas Pertanian Manggarai Timur dengan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian di Desa Benteng Raja. Adapun hasil *collaborative governance* dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi kolaborasi yaitu kolaborasi primer, kolaborasi skunder, dan kolaborasi tersier.

Kolaborasi Pimer

Kolaborasi antara kelompok dan individu yang sebenarnya menyatu menjadi satu kelompok sangat penting. Sebuah organisasi yang mencakup keseluruhan kehidupan seseorang, dengan setiap anggota mengejar pekerjaan untuk kepentingan seluruh kelompok. Berikut hasil wawancara berdasarkan pada indikator diatas, oleh kepala dinas pertanian Manggrai Timur sebagai berikut: *"Dalam membangun kolaborasi antara Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur dengan Pemerintah Desa, di Desa Kami adakan PPL selaku Penyuluh pertanian Lapangan yang dimana kami rekomendasikan dari Dinas Pertanian untuk bagaimana mendukung, membina, serta memberi pelatihan kepada kelompok tani bersama Pemerintah Desa Kita membangun komitmen agar para petaninya*

Kita tetap produktif dalam bertani".

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa proses kolaborasi pemerintah dengan stakeholder dalam hal mendukung sektor pertanian itu penting, tentu dalam membangun kerjasama antara Dinas Pertanian dengan Pemerintah Desa dalam hal mendorong para petani di Desa Benteng Raja agar tetap produktif ini musti menjadi perhatian serius demi kesejahteraan para petani. Desa Benteng Raja memiliki potensi yang banyak untuk perlu dikembangkan, salah satunya sektor pertanian yang menjadi penyokong utama untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai masyarakat yang pekerjaannya fokus pada sektor pertanian tentu selalu membangun kolaborasi dengan pemerintah maupun para pedagang, untuk bagaimana hasil produktifitas pertanian bisa dijual dengan pemodal atau para pedagang dengan stabilitas harga ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Kerjasama Dinas Pertanian dengan Pemerintah Desa maupun para petani itu sendiri musti harus menjalin hubungan dengan baik dalam mendukung penuh sektor pertanian di Desa Benteng Raja.

Kolaborasi Sekunder

Kolaborasi sekunder merupakan khas pada masyarakat modern. Contohnya yaitu kolaborasi dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan lain sebagainya. Kolaborasi sering dibangun oleh pemerintahan dengan stakeholder lainnya dalam mendukung tujuan dan harapan apa yang dicapai dalam proses bekerjasama. Sektor pertanian di Desa Benteng Raja merupakan salah satu aset penting yang terus dikembangkan oleh para petani, dan perlu membangun sinergi dengan pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten dalam hal mendukung penuh dalam pengembangan sektor pertanian di Desa. Para petani di Desa juga harus dilatih melalui penyuluhan

pertanian yang ada di Desa agar menjadi petani profesional. Pemerintah Desa Benteng Raja bermitra dengan para pemodal atau pedagang yang ada di Desa, dengan membangun kerjasama agar semua hasil pertanian di Desa sendiri tidak boleh jual di Desa lain. Tentu hal ini harus menjamin terhadap para petani di Desa dengan standar harga komoditi sesuai dengan harga pasaran.

Kolaborasi Tersier

Konflik laten berfungsi sebagai dasar untuk kolaborasi dalam skenario ini. Pendekatan pihak-pihak yang bermitra hanya bersifat oportunistik. Organisasi mereka ceroboh dan cepat hancur. Berdasarkan indikator di atas berikut hasil wawancara dengan kepala Dinas Pertanian Manggarai timur sebagai berikut: *“Proses kolaborasi dalam ruang lingkup instansi pemerintahan itu memang sangat penting bagi kami, terutama dalam hal mendukung peningkatan produktifitas pertanian di setiap desa yang ada di Manggarai Timur saat ini. Sejauh ini memang kerjasama kami dalam membangun kepercayaan kepada orang-orang kami yang diutus dari dinas ke setiap desa sebagai Penyuluhan Pertanian yang berada di lapangan sampai saat ini memang baik. Saya selaku Kadis Pertanian selalu mengecek soal keberadaan orang-orang kami yang berada di lapangan dalam menjalankan tugas masing-masing apakah mereka aktif atau tidak.*

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa membangun kepercayaan dalam berkolaborasi itu sangat penting bagi setiap lembaga maupun dalam instansi pemerintahan. Proses kolaborasi di Dinas Pertanian Manggarai Timur masih berjalan dengan baik. Selain itu, didalam pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat, tentunya masih menuai permasalahan yang terdapat pada lapangan yang seperti dikemukakan oleh salah satu narasumber peneliti kepala desa Benteng Raja mengemukakan bahwa: *“Terkait mengenai*

masalah pertanian di desa kita saat ini memang masih ada kendala di sistem pertaniannya dek, para petani kita didesa dalam proses pengolahan lahan pertanian masih sistem tradisional sekali. Hal ini seharusnya Pemerintah Daerah bersama Dinas Pertanian membuka mata dan membantu para petani dalam mendukung agar peningkatan hasil pertanian didesa kita tetap stabil.

Kemudian pernyataan di atas dibenarkan oleh salah seorang masyarakat petani bahwa terdapat kendala yang ada pada lapangan sebagai berikut: *“Petani didesa kita semacam tidak ada perhatian dari pemerintah dalam mendukung kesejahteraan begitu, para petani didesa kita ini banyak. Juga terkait keberadaan alat pertanian didesa seperti traktor, maupun alat pertanian lainnya hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja seperti orang-orang terdekat dari PPL di desa saja*

Berdasarkan hasil penelitian kolaborasi Dinas Pertanian dengan pemerintah Desa Benteng Raja dalam mensupport atau mendukung produktifitas pertanian di Desa kurang begitu efektif. Kemungkinan hal ini menjadi putusnya sinergitas pemerintah dalam mendukung masyarakat yang bergelut di bidang pertanian. Apabila kolaborasi yang menjadi komitmen pemerintah untuk bagaimana melihat dengan jeli terkait persoalan peningkatan pertanian di Desa. Perhatian pemerintah atau Dinas Pertanian terhadap kelompok tani yang ada di Desa itu penting lewat penyuluhan pertanian lapangan (PPL) agar para petani di Desa itu terlatih untuk bagaimana cara bertani yang baik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara kolaborasi Dinas Pertanian dengan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian di Desa Benteng Raja kurang begitu berjalan dengan baik, hal ini dapat memicu

permasalahan bagi para petani di Desa sehingga menyebabkan industri pertanian kurang optimal, daya dukung dan pendampingan, program kebijakan dan pengelolaan lahan pertanian pada pemerintah sangatlah dibutuhkan, oleh karena itu menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan idealnya dibuat strategi jangka panjang pada industri pertanian. Keinginan para petani kepada pemerintah tentunya kolaborasi itu penting dilakukan, supaya terciptanya kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan secara bersama. Adapun faktor pendukung kolaborasi pada Dinas Pertanian Manggarai Timur dengan Pemerintah desa dalam mendukung sektor pertanian di Benteng Raja yaitu dengan membangun sebuah komitmen dan kepercayaan dengan seluruh *stakeholder* diinternal Dinas Pertanian maupun PPL dilapangan sebagai mitra untuk membantu para petani di Desa dalam mengurus masalah tentang sistem pertanian. Selain itu pemerintah desa membangun kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana membantu para petani di Desa dalam bentuk kebutuhan pertanian secara merata pada masyarakat guna mempengaruhi dan menjaga peningkatan produktifitas pertanian masyarakat. Selain itu dibutuhkan pemimpin yang kompeten, kredibel dan peduli terhadap kemajuan pertanian masyarakat petani. Idealnya industri pertanian idealnya melakukan aliansi strategis dengan penerapan strategi kolaborasi terhadap pihak yang terkait. Sedangkan faktor penghambat adalah SDM pada bidang pertanian, sehingga mempengaruhi daya dukung proses kebijakan kolaborasi antara kelompok kepentingan.

REFERENSI

Azis, Abdul; Sugiarti, Cucu; Ramdani, Rachmat. (2015). *Collaborative Governance Dalam Upaya Meningkatkan*

Kinerja Sektor Pertanian. Jurnal Manajemen, 2022, 13.4: 647- 653.

Agranoff and Guire, (2003). *Collaborative Public Decision Management Local: New Strategies for Local Government*, Washington: Georgetown University Press.

Ansell and Gash, (2008). *Collaborative Governance in theory and Practice.* Journal of Public Administration Research and Theory 18 (4): 543-571

Anonimous, (2004,). *Pedomaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*. Departemen RI Topik Latihan Di BPP. Departemen Pertanian.

Donalhue dalam Sudarmo, (2011). *On Collaborative Governance, Corporate Social responsibility Initiative Working paper No.2* Cambrigde.

Emerson, Kirk et.al, (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory,

Faizah. (2005). *Serikat Petani Pasundan (SPP); Agriculture-Indonesia; Agriculture-Economic aspects*-Piramedia-Jakarta.

Islami H, La Ode Syaiful, (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta:Deepublis.

Pitaloka, E. D. A, (2020). *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, embaran Negara Tahun 2009 Nomor 149.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Thomson, AM, Perry J,L, (2006). *Colaborative Proes Inside The Blck Box, Article Oncolaborative Publik Management*.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Pertanian. (2020). *Statistik Lahan Pertanian*.



Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019
Tentang Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Sawah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.